

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA LALUMPE KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**Olivia Merentek
Masje Silija Pangkey
Joorie Marhaen Ruru**

***ABSTRACT :** Public participation is as a form of the involvement of members of the community in all development which includes activities in the planning and implementation of development programs. Community participation in the form of participation is supporting success program given by the government. Program Development programs village axis road in the village aims to public welfare is to make access easier in doing their activity originally road conditions unfit for impassable winter hence in expect participation of the community to resolve existing problems in the village.*

This study attempts to describe participation in rural development planning through musrenbang in lalumpe village motoling. Research method used is descriptive with a qualitative approach. But speakers this study of them are village officials and villagers lalumpe. Data collection , reduction data, presentation of data, and the withdrawal of conclusion.

The result showed that villagers lalumpe in motoling district minahasa selatan gave participation and support in development village road. Villagers lalumpe willing to give their participation in any activity conducted the participation in planning, participation in benefit, participation in evaluation. In this research shows that public participation can be assessed good demonstrated by the role of the active in the development although it needs evaluation in development village road in order to resolve well

Advice given in this research is that the program can be accomplished with coordination namely with the community to the people support fully in the smooth development of village road.

***Keywords :** Public Participation. Planning, Development*

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan mendasar kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Perkembangan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan

pembangunan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang di laksanakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses (Arif, 2006:149-150). tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak di perlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat loyalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang di hadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Di Indonesia selama masa pemerintah orde baru (1996-1998), Pembangunan yang dilakukan oleh seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dijalankan dengan sistem perencanaan yang di anut adalah sistem perencanaan di mana semua program-program pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat hanya menerima saja (Nugroho, 2006). Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, dan juga dipertegas Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa.

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa serta masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu dioptimalkannya partisipasi masyarakat yakni keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana

pembangunan. Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggaraan negara, masyarakat, rohaniawan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi, non-pemerintah, dan lain-lain. Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrument yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tersebut di atas adalah tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa, meskipun demikian pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, anggaran terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, pelebaran jalan atau pembebasan lahan. Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1998:247).

Masyarakat masih di anggap oleh objek/sasaran yang akan di bangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasasmita, 1996:144). Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama di laksanakan dan cukup di kenal di desa, namun masyarakat selalu di anggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merusak (Internalisasi) dalam masyarakat bimbingan dan arahan dari pemerintah bila kondisi tersebut di pertahankan, maka

masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Adapun bentuk pembangunan secara substantif akan selalu di artikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang di rencanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat karena di tujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakat sebagai pemilik kegiatan pembangunan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses di mana usaha-usaha dari pemerintah tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Di era desentralisasi dan keterbukaan ini, sudah saatnya masyarakat desa di beri kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. Kewenangan tersebut baik yang di mulai sejak perancangan/penentuan aktivitas, pelaksanaan hingga evaluasinya pendekatan semacam ini memungkinkan semua aktivitas pembangunan di desa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa dan sesuai dengan konteks setempat (baik kondisi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisiknya).

Namun demikian, terkait dengan proses pembangunan desa, belum terlihat secara utuh implementasi perencanaan partisipasi yang menjadi amanat baik yuridis maupun sosiologi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum di temukan bahwa selama ini partisipasi masyarakat relatif lemah, baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal desa maupun untuk mengatur aktivitasnya sendiri.

Jika kita lihat ke belakang, bahwa pola perencanaan berjenjang dari bawah ke atas (partisipatif) ternyata tidak banyak

menjanjikan aspirasi murni warga desa bisa di dengar. Kita mengenal proses MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), di lanjutkan dengan MUSRENBANGDES di tingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritis mengandung banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil berbagi forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa) kadang pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari MUSRENBANGDES hanya bersifat partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. MUSRENBANGDES dalam perjalanannya selama ini belum dapat di andalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif. Padahal sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa macetnya perencanaan partisipatif akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif. Pelaksanaan pembangunan desa tergantung pada usaha-usaha mendinamiskan masyarakatnya. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan usaha pembangunan tersebut sangat terbatas. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintahan setempat. Dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut diperlukan pemikiran lebih jauh, yaitu tentang cara-cara untuk membawa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dukungan dari masyarakat tidaklah begitu mudah diperoleh. Munculnya kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di desa akan membawa pengaruh yang penting. Terutama, akibat melemahnya sistim komunal desa, dukungan yang integrative sukar diperoleh seperti pada saat yang lampau ketika kepala

desa mudah dapat mengarahkan penduduk. Dengan demikian pembangunan memerlukan dukungan dari pemimpin-pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh kuat melalui aliran kepercayaan di desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan”.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:6), penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau dengan menggabungkan dengan variable lain. Oleh sebab itu variabel tunggal yang saya ambil adalah perencanaan pembangunan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek di mana kegiatan peneliti dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Lokasi penelitian ini berada di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto, 2006: 145). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan sampel tidak digunakan, tetapi menggunakan informan (informan kecil). Sebagaimana yang dikemukakan menurut

Sugiyono (2005:96) yang menjelaskan sampling purposive merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yakni dengan pertimbangan yang menjadi sampel adalah pihak yang mengetahui dan mengerti tentang masalah dalam penelitian..

Adapun jumlah sumber data dan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Bendahara Desa : 1 orang
3. Sekertaris Desa : 1 orang
4. Kepala BPD : 1 orang
5. Kepala Urusan Pembangunan : 1 orang
6. Masyarakat Desa : 5 orang

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa lalumpe kecamatan motoling kabupaten minahasa selatan. Variable tunggal yang akan diteliti adalah partisipasi masyarakat yang menurut Cohen dan Uphoff (2011:61).

- 1). Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 2). Partisipasi dalam pengambilan manfaat.
- 3). Partisipasi dalam pelaksanaan.
- 4). Partisipasi dalam evaluasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara di mana wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya.

Teknik wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi atau data tentang perencanaan pembangunan di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan.

b. Dokumen/Arsip

Dalam peneliti ini peneliti mengambil metode atau teknik dokumentar dimana metode tersebut adalah teknik pengumpulan data dan informan melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dokumen yang dimaksud peneliti adalah dokumen tertulis laporan peneliti sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah tentang penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif. Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data dan dilanjutkan dengan reduksi data dengan jalan melakukan abstraksi. Reduksi data ini berlangsung dan dijalankan setelah data terkumpul. Data-data yang telah direduksi kemudian dibuat kategori dan selanjutnya dibuat penafsiran dan interpretasi data. Langkah terakhir analisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan atau verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mencapai tujuan rencana pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi maka dipastikan suatu desa tidak akan bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik. Dan berikut ini merupakan pembahasan yang ditelusuri berdasarkan indikator-indikator, yaitu :

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat karena masyarakat dapat mengemukakan setiap pendapat dan menentukan keputusan-keputusan atau kebijakan apa yang akan diputuskan dan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat dibebaskan memberikan usulan atau ide-ide, saran dan kritik tentang perencanaan pembangunan desa dengan cara melalui rapat atau pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa telah melakukan usaha-usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu rapat atau pertemuan atau musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa, tetapi kebanyakan dari masyarakat masih kurang menyadari bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga pada saat diadakan rapat mengenai perencanaan pembangunan desa kehadiran dari masyarakat masih kurang atau rendah. Keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu usulan atau informasi sebagai bahan pada pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan desa kedepan.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Pada dasarnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan berupa bantuan tenaga dan sumbangan dana. Sifat gotong royong serta kesadaran dari setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya bantuan gotong royong dari masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sifat sukarela atau dengan sepenuh hati yang nantinya akan merasakan dampak positif dari setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah rasa kurang kepedulian dari masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan atau kesibukan masing-masing. Padahal kepedulian dari masyarakat yang nantinya akan memberikan perkembangan atau pertumbuhan bagi pembangunan desa yang ada.

c. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat adalah partisipasi dalam bentuk menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa, karena masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tetapi dalam pengambilan pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang yang terkandung membuat setiap pembangunan desa yang sudah dibangun mengalami kerusakan. Padahal menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa itu adalah merupakan bagian atau tugas dari masyarakat yang

menggunakannya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sering di pengaruhi oleh pekerjaan seseorang. Dan pekerjaan dari seseorang memberikan pengaruh terhadap keterlibatannya dalam kegiatan pemanfaatan menjaga, merawat dan memelihara pembangunan yang ada didesa. Hal inilah yang diperlukan oleh pemerintah dan setiap masyarakat untuk saling membantu memperhatikan setiap bangunan desa yang rencana akan dibangun untuk dapat digunakan setiap saat dan yang bisa digunakan dalam waktu yang lama.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi hasil rencana pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap perencanaan pembangunan yang akan berjalan. Tujuan dari evaluasi ini juga dapat dijadikan pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kedepan. Untuk melakukan evaluasi hasil perencanaan pembangunan tersebut biasanya pemerintah melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan masyarakat yang membahas dan membicarakan hasil-hasil dari rencana pembangunan desa yang akan direncanakan. Pada proses evaluasi selain membicarakan hasil-hasil dari rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat juga sering melakukan penilaian berupa menyampaikan kritikan dan saran mengenai rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan kepada pemerintah, karena saat dalam proses perencanaan pembangunan desa pemerintah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat. Selain kritikan, masyarakat juga menyampaikan saran kepada pemerintah agar proses rencana pembangunan desa kedepan boleh berjalan lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas bab

sebelumnya, dengan ini peneliti menyampaikan bahwa :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan didesa Lalumpe masih tergolong kurang atau rendah karena dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan perencanaan pembangunan desa hanyalah beberapa orang perwakilan masyarakat saja.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan didesa Lalumpe juga masih rendah terutama kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat karena dalam proses perencanaan pembangunan desa ada beberapa orang yang dipengaruhi atau sibuk dengan kepentingan masing-masing.
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang didalamnya kesadaran menjaga, merawat dan memelihara setiap program rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, karena pembangunan desa mengalami kerusakan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi didesa Lalumpe sering mengkritik pemerintah, karena penilaian masyarakat selama belum berjalannya kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang akan dilakukan pemerintah kurang memberikan perhatian yang membuat semangat masyarakat menurun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diDesa Lalumpe, maka peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya :

- a. Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan kesadaran yang akan dilakukan, seperti memberikan sosialisasi dan bimbingan bagi masyarakat desa mengenai pentingnya perencanaan pembangunan.

- b. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diharapkan pemerintah dapat mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan karena masyarakat terkadang dipengaruhi atau disibukan dengan pekerjaan masing-masing.
- c. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Lalumpe untuk lebih menyadari betapa penting menjaga dan merawat setiap hasil pembangunan yang sudah ada agar dapat digunakan setiap saat dan dalam waktu yang lama.
- d. Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat agar dapat menjalin hubungan kerjasama dalam mengawasi jalannya setiap kegiatan rencana pembangunan desa dan juga saling memberikan dukungan serta semangat terhadap satu dengan yang lain dalam setiap kegiatan rencana pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syaiful, 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press
- Arikunto, Suharismi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasmita. G. 2006. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : PT. Pustaka CIDES INDO
- Korten, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Nugroho, Riant, 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*,. Jakarta: Elex Media Komutindo
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

SUMBER LAIN :

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang desa.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014
tentang perencanaan pembangunan
desa.